BAB III

FENOMENA PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN TIDAK HALAL

A. Tingkat Kesadaran Terhadap Kehalalan Produk Di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah suatu penanda bahwa perhatian pemerintah terhadap makanan, minuman, obat dan pangan halal semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan puncak dari perkembangan perundang-undangan yang menyinggung mengenai masalah kehalalan produk.

Perhatian terhadap kehalalan produk sendiri sebenarnya telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dimana mengatur mengenai pencantuman label keterangan halal pada ketentuan Label Pangan. Berselang beberapa tahun kemudian, berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyinggung mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk tidak mengikuti ketentuan halal pada produk yang telah dinyatakan halal sebelumnya.

Kedua perturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur mengenai masalah kehalalan secara spesifik. Bahkan apabila dicermati, ketentuan berproduksi secara halal dalam kedua Undang-Undang tersebut hanya bersifat sukarela pada produk yang telah dijanjikan halal saja. Hal ini dapat terjadi karena kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal saat itu

belum begitu besar, sehingga masalah kehalalan produk dianggap tidak membutuhkan perhatian yang lebih.

Maka dari itu, bangkitnya perhatian pemerintah terhadap produk halal berkaitan erat dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan beragama. Hal ini juga dapat dilihat dimana konsep halal saat ini tidak hanya diterapkan dalam produk makanan, minuman, obat, dan pangan halal, melainkan juga pada bidang lain, seperti sistem ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya.⁴⁹

Ketika gaya hidup halal telah mencakup berbagai aspek kehidupan, maka akan tumbuhlah kesadaran masyarakat terhadap masalah kehalalan. Menurut Direktur Halal Corner, komunitas masyarakat yang bergerak dibidang kehalalan produk, Aisha Maharani mengatakan bahwa halal seharusnya tidak lagi dipandang hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi suatu kebutuhan. Apabila halal telah dianggap sebagai suatu kebutuhan oleh masyarakat, maka secara otomatis akan mempengaruhi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya.⁵⁰

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal akan membuat pelaku usaha lebih memperhatikan bahan-bahan yang terkandung didalamnya untuk dipastikan bahwa bahan tersebut sehat dan halal. Karena jika tidak demikian, produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut tidak akan

⁴⁹ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm 89.

⁵⁰ Nidia Zuraya, *Kesadaran Masyarakat Mengonsumsi Produk Halal Masih Lemah*, *Republika.co.id.*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/16/o2m324383-kesadaran-masyarakat-indonesia-mengonsumsi-produk-halal-masih-rendah> diakses pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 18.53 WIB.

laku dipasaran apabila masyarakat telah menjadikan produk halal sebagai prioritas.

Kesadaran halal adalah kemampuan seorang untuk dapat memahami ukuran seberapa pentingnya halal, manfaat dari mengonsumsi makanan halal, mengetahui penggolongan bahan halal dan tidak halal, serta proses penyembelihan yang benar. Indikator kesadaran halal sendiri meliputi:⁵¹

1. Pemahaman atau pengetahuan.
2. Sadar akan halal.
3. Kebersihan dan keamanan produk.

Kesadaran halal tersebut harus ditanam sejak awal, karena tak jarang perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap produk halal baru muncul ketika adanya kasus ditemukannya kandungan bahan tidak halal pada suatu produk. Langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan edukasi mengenai standar kehalalan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan terhadap kehalalan produk, masyarakat akan semakin kritis dan cerdas dalam membedakan produk halal dengan produk yang tidak halal.

Selanjutnya, edukasi kehalalan juga cukup penting bagi pelaku usaha, mengingat pihak produsen dalam menjalankan usahannya berada di wilayah Indonesia dengan mayoritas konsumen beragama muslim. Pelaku usaha perlu untuk mengetahui ketentuan berproduksi secara halal yang baik, untuk dapat menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim. Karena, walaupun

⁵¹ Nurul Khomariah, "Pengaruh Kesadaran Halal", *Islamic Branding*, dan *Product Ingredients*, Terhadap Minat Beli Produk White Coffie (Studi Pada Masyarakat Putatsewu, Jatitengah, Sukodono, Sragen)", Skripsi, Surakarta, IAIN, 2017, hlm. 17

masyarakat dituntut untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai kehalalan, namun sejatinya konsumen tetap bergantung kepada kesadaran pelaku usaha itu sendiri, sebagai pihak yang melakukan kegiatan produksi.

Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal di Indonesia sejauh ini, tercatat pada periode tahun 2012-2017 dapat dilihat berdasarkan statistik dari LPPOM-MUI sebagai berikut:⁵²

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH SERTIFIKASI HALAL	JUMLAH PRODUK
2012	5.829	6.157	32.890
2013	6.666	7.014	64.121
2014	10.180	10.322	68.576
2015	7.940	8.676	77.256
2016	6.564	7.392	114.264
2017	7.198	8.157	127.286

Melihat data tersebut, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 2012 jumlah sertifikasi halal yang hanya mencapai 6.157, meningkat menjadi 7.014 di tahun 2013. Jumlah sertifikasi halal mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun 2013 ke tahun 2014, dari jumlah 7.014 menjadi 10.322. Sementara pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah sertifikasi halal kembali meningkat dari angka 7.392 menjadi 8.157. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan jumlah produk.

⁵²Majelis Ulama Indonesia, *Ini Capaian Kinerja LPPOM-MUI*, <http://mui.or.id/id/berita/ini-capaian-kinerja-lppom-mui/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, pukul 18.54 WIB

Manfaat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap produk halal tidak hanya dirasakan oleh konsumen namun juga bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal salah satunya bertujuan untuk:

“meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal”

Artinya bahwa dengan meningkatkan kesadaran terhadap produk halal, pelaku usaha dapat menaikkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat, khususnya konsumen muslim terhadap produk yang dihasilkannya.

B. Kasus Peredaran Produk Tidak Halal Di Indonesia

Umat muslim di Indonesia perlu untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam upaya menjalankan salah satu perintah agamanya, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi segala sesuatu yang dikategorikan tidak halal. Mengingat halal adalah bagian dari perintah agama, sehingga mendapatkan produk halal bagi seorang muslim adalah sesuatu hal yang mutlak. Hak tersebut bahkan telah dijamin oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan perintah dalam agamanya tersebut.

Melihat perkembangannya saat ini, perhatian pemerintah terhadap jaminan kehalalan terhadap produk dan barang konsumsi dapat dikatakan meningkat seiring disahkannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai produk halal. Meningkatnya perhatian pemerintah tersebut tak lepas dari munculnya beberapa isu peredaran produk tidak halal yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya, beredarnya isu produk-produk yang mengandung unsur-unsur babi didalamnya. Sementara dalam ajaran agama Islam, bahan yang berasal dari babi telah jelas dikategorikan tidak halal.

Menurut Wakil Direktur LPPOM-MUI Jawa Barat, Ir. Agus Sugilar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan berproduksi secara halal antara lain:⁵³

1. Ketidapkahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip kehalalan.
2. Kebanyakan merupakan produk-produk yang berasal dari luar negeri, dimana ketersediaan bahan yang berasal dari babi lebih melimpah dari hewan lainnya.

Lanjut Agus, bahwa babi dan turunannya sendiri memang dapat dimanfaatkan dalam suatu produk antara lain:

1. Bulu babi yang diketahui dapat menghasilkan asam amino sistein. Zat tersebut biasanya digunakan dalam pembuatan bahan perasa, dan pelembut roti. Bulu babi juga biasanya dipakai pada sikat gigi dan kuas

⁵³ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Wakil Direktur LPPOM-MUI Jawa Barat, Ir. Agus Sugilar, pada hari Rabu, Tanggal 25 Juli 2018.

2. Jeroan babi seperti:
 - a. Lambung babi yang menghasilkan enzim *rennet* yang digunakan dalam pemisahan susu menjadi keju. Enzim tersebut juga digunakan pada pembuatan vetsin (MSG).
 - b. Usus babi digunakan pada benang jahit operasi dan bungkus sosis.
 - c. Pankreas babi digunakan dalam vaksin.
 - d. Empedu babi digunakan pada suplemen makanan.
3. Daging babi yang biasanya digunakan dalam berbagai macam bentuk olahan seperti bakso, kornet, sosis, abon serta makanan siap saji lainnya.
4. Lemak babi yang biasanya dimanfaatkan dalam berbagai bahan makanan seperti shortening, susu, penyedap, mentega, yang digunakan dalam pembuatan kue, donat, biskuit, dan roti. Lemak babi juga dapat menghasilkan minyak babi yang digunakan dalam kosmetik, mie, kaldu, dan minyak goreng.
5. Tulang babi yang dapat diolah menjadi *gelatin*, biasa digunakan dalam pembuatan jelly, selai, dan kapsul obat.
6. Darah babi yang mengandung protein dan mineral, biasanya dimanfaatkan sebagai media fermentasi dan juga diolah menjadi tepung darah untuk digunakan pada campuran sosis.
7. Kulit babi yang bisa diekstrak menjadi *Kolagen*. Bahan tersebut biasanya digunakan dalam beberapa produk kosmetika anti penuaan

dan dapat mengencangkan kulit. Kulit babi juga biasa diolah menjadi berbagai makanan seperti kikil, kerupuk kulit, hingga pakaian jaket, tas, dan sepatu.

Agus menjelaskan, dalam prinsip Hukum Islam dikenal bahwa segala yang ada di alam pasti memiliki manfaat. Kendati begitu, apa yang bermanfaat belum tentu boleh digunakan karena dalam hukum islam juga dikenal dengan istilah halal dan tidak halal. Ketidakhilalan babi telah ditegaskan didalam syariat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga tidak ada batas toleransi dalam penggunaan bahan dari babi pada suatu produk.⁵⁴

KH. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dalam ajaran Islam penggolongan babi sebagai bahan yang dikategorikan tidak halal bersifat mutlak. Hal tersebut disebabkan karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi daging babi. Penelitian para ahli membuktikan bahwa selain mengandung cacing pita (*taenia solium*), daging babi juga mengandung kolesterol lima belas kali lipat lebih tinggi dari hewan lainnya. Daging babi juga dapat meningkatkan trigliserida, yaitu kadar lemak dalam darah.⁵⁵

Sederet isu mengenai kandungan babi dan bahan tidak halal lainnya pada suatu produk pernah terjadi di Indonesia. Bahkan tak jarang isu tersebut mencemarkan perusahaan-perusahaan besar. Isu lemak babi mulai terjadi pada tahun 1988 dan dapat dikatakan cukup menghebohkan karena

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ KH. Ma'ruf Amin, dikutip dalam Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 287

mencemarkan salah satu produk susu dari perusahaan kenamaan di Indonesia. Isu kandungan babi juga kembali merebak pada tahun 2001, kali ini melibatkan salah satu produk penyedap rasa yang cukup terkenal di Indonesia. Selain membawa nama-nama perusahaan besar di Indonesia, isu penggunaan bahan tidak halal juga melibatkan pedagang-pedagang kecil seperti ditemukannya bakso oplosan daging babi di Citeureup, Kabupaten Bogor, dan penjualan daging sapi oplosan daging celeng di salah satu kios daging Pasar Margahayu Kabupaten Bandung.

Isu beredarnya produk makanan dengan kandungan bahan tidak halal nampaknya belum mereda, bahkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar pengaturan dalam upaya memberikan kepastian terhadap produk halal bagi masyarakat. Pada tahun 2017, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya produk mie instan asal Korea Selatan yang sempat terindikasi mengandung unsur babi di dalamnya.

BPOM pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 mengumumkan menarik empat produk mie instan asal Korea Selatan bermerk Samyang varian U-dong, Samyang rasa kimchi, Nongshim dan Ottogi. Penarikan tersebut dilakukan berdasarkan temuan adanya kandungan *Deoxyribo Nucleud Acid* (DNA) babi dalam produk tersebut. DNA babi adalah komponen terkecil yang menjadi bagian dari unsur-unsur dalam tubuh babi. Menurut Agus Sugilar, DNA mewakili asal-usul tubuh manusia maupun hewan. Sehingga

untuk mengetahui sumber hewani apa yang paling dominan dipakai dalam suatu produk, dapat dilakukan dengan cara mengecek DNA-nya tersebut.

Produk mie instan asal Korea Selatan yang beredar dipasaran diimpor oleh dua importir yang berbeda. Dua importir tersebut adalah PT. Koin Bumi dan PT. Korinus. Empat produk mie instan Korea Selatan yang diimpor oleh PT. Koin Bumi, dua diantaranya bermerk samyang, merupakan produk dengan nama dagang yang sama dengan yang diimpor oleh PT. Korinus, namun memiliki varian rasa yang berbeda. Empat produk mie instan Korea yang terindikasi mengandung DNA babi tersebut merupakan produk yang diimpor oleh PT. Koin Bumi. Selanjutnya, untuk produk mie instan asal Korea Selatan yang diimpor oleh PT. Korinus, telah didaftarkan sertifikasi halalnya ke MUI.

Prihal empat produk yang terindikasi mengandung unsur-unsur babi tersebut dapat beredar dipasaran dan memiliki izin edar, BPOM menjelaskan sebelumnya dalam proses registrasi, pihak importir dalam dokumennya menyatakan produk yang diimpor tersebut merupakan produk yang tidak mengandung babi. Namun saat empat produk itu beredar, justru terindikasi mengandung babi didalamnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan izin edar, pihak importir juga tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produk tersebut, sehingga tidak terdapat label halal pada kemasannya.

Pihak PT. Koin Bumi selaku importir dan distributor keempat produk mie instan asal Korea yang terindikasi mengandung unsur babi tersebut memberi penjelasan bahwa dalam proses pendaftaran keamanan pangan

(PKP), BPOM tidak mensyaratkan uji DNA kepada importir. Kendati begitu, pihak importir tetap melakukan penarikan terhadap keempat produknya tersebut. Pihak importir berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh BPOM, menyangkut adanya kandungan DNA babi pada keempat produk tersebut untuk dilakukan perbaikan.

BPOM sendiri mengakui dalam pemberian izin edar, pihaknya hanya melakukan *random sampling* dan memeriksa dokumen yang diberikan importir, tanpa melakukan tes terhadap kandungan makanan. Hal ini terjadi karena BPOM selama ini menerapkan prinsip kepercayaan kepada importir dan dituntut untuk melakukan percepatan produk hingga sampai ke konsumen. Atas kejadian tersebut BPOM merasa kepercayaan yang telah diberikan oleh pihaknya telah disalah gunakan oleh importir.⁵⁶

Fungsi pengawasan terhadap peredaran produk di Indonesia sendiri menjadi kewajiban bagi BPOM dan LPPOM-MUI. Baik BPOM dan LPPOM-MUI mempunyai tanggung jawab yang berbeda untuk urusan uji makanan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam proses registrasi izin edar lebih mentikberatkan pada uji kandungan makanan berdasarkan aspek kesehatan dan keamanan, sementara uji kehalalan dalam proses penerbitan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab bagi LPPOM-MUI.

Tahap registrasi izin edar adalah proses yang paling menentukan mengenai diizinkan atau tidaknya suatu produk untuk beredar dipasaran. Proses uji kehalalan untuk penerbitan sertifikasi halal oleh LPPOM-MUI juga

⁵⁶AlfianSyafri, *BPOM Tidak Cek Kandungan Mi Samyang*, Net.Z,<https://netz.id/news/2017/06/19/00516-01616/1010190617/bpom-tidak-cek-kandungan-mi-samyang>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, pukul 17.10 WIB.

tidak dapat dilakukan sebelum adanya izin edar dari BPOM. BPOM seharusnya dapat semakin memperketat proses registrasi dalam pemberian izin edar.